

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia. Peningkatan kesejahteraan ini antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang berkelanjutan (Sukirno, 2011)

Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi berkurangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan inti dari pembangunan. Selama pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasil dari pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, maka masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak akan muncul. Dengan demikian kinerja ekonomi yang lebih baik atau mengalami kemajuan dapat ditunjukkan dalam bentuk naiknya tingkat pendapatan secara merata.

Pengelolaan Pemerintah Daerah di Indonesia sejak tahun 2001 memasuki era baru dengan dijalankannya otonomi daerah. Otonomi daerah ini ditandai dengan

keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan yang sudah berlangsung secara menyeluruh di Provinsi Jambi tentunya sudah menaikan perekonomian masyarakat. Capaian dan juga hasil-hasil pembangunan yang juga dirasakan oleh masyarakat adalah sebuah agregat pembangunan dari 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Jambi yang juga tidak terlepas dari usaha dan kerja keras secara bersama antara masyarakat dan pemerintah. Potensi dan kekayaan alam daerah ini bisa dilihat sebagai keunggulan yang komparatif bagi daerah, akan tetapi disisi lain banyak kendala yang masih dialami seperti sumber daya manusia dan juga modal untuk memanfaatkan potensi tersebut yang dihadapi oleh penentu kebijakan entah dari tingkat provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Menurut Arsyad (2014: 76) dari kondisi perekonomian belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan, masih ditemukannya kekurangan yaitu adanya kesenjangan antar wilayah khususnya di kabupaten/kota dalam mencapai tingkat perekonomian.

Ketimpangan pendapatan dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan demografis, akses mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, perbedaan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan jumlah angkatan kerja, alokasi dana pembangunan antar wilayah, serta ketertarikan investasi pada suatu wilayah

(Todaro. Smith, 2014: 142). Karena faktor tersebut maka pertumbuhan output setiap daerah berbeda dan pada akhirnya menyebabkan disparitas. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disparitas pendapatan yang akan peneliti bahas adalah dana alokasi umum, investasi dan jumlah penduduk miskin.

Dana alokasi umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjembatani kesenjangan anggaran dan menyeimbangkan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah untuk mendukung kemandirian kinerja pemerintah daerah. Pemberian dana alokasi umum oleh pemerintah ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah (Widjaja, 2012: 52).

Dana alokasi umum dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan asumsi bahwa dana alokasi umum lebih digunakan untuk belanja pembangunan daripada belanja rutin. Alokasi dana alokasi umum untuk belanja pembangunan memungkinkan suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan (Sjafrizal, 2018:27). Dana Alokasi Umum, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain belanja pembangunan, belanja modal juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Berikut adalah dana alokasi umum Provinsi Jambi.

Tabel 1.1
Penerimaan Dana Alokasi Umum Provinsi Jambi Tahun 2000 – 2023 (Rupiah)

Tahun	Dana Alokasi Umum	Perkembangan (%)
2000	428.075.169	-
2001	474.824.467	10,92
2002	521.573.765	9,85
2003	568.323.062	8,96
2004	615.072.360	8,23
2005	661.821.658	7,60
2006	708.570.956	7,06
2007	755.320.254	6,60
2008	802.069.552	6,19
2009	848.818.849	5,83
2010	895.568.147	5,51
2011	942.317.445	5,22
2012	989.066.742	4,96
2013	1.035.816.040	4,73
2014	1.082.565.338	4,51
2015	1.009.165.864	(6,78)
2016	1.070.452.478	6,07
2017	1.397.912.161	30,59
2018	1.399.367.134	0,10
2019	1.433.203.410	2,42
2020	1.288.418.327	(10,10)
2021	1.288.418.327	0,00
2022	1.456.559.720	13,05
2023	1.503.309.017	3,21
Rata-Rata		5,86

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa dana alokasi umum di Provinsi Jambi tahun 2000-2023 berfluktuasi akan tetapi cenderung meningkat rata-rata sebesar 5,86 persen hal ini dapat dilihat dana alokasi umum tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1,397,912,161 atau naik 30,59 persen dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1,288,418,327 atau turun 10,10 persen. Proporsi dana alokasi umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan adanya dana alokasi umum yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akhirnya akan menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat (Widjaja, 2012: 56). Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi penyebaran dana alokasi umum

tiap daerah dari nilai rata-rata seluruh daerah semakin tinggi pula kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Investasi merupakan dana yang dikeluarkan dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Menurut (Sukirno, 2015: 132) Investasi memiliki peran penting dalam pola pembangunan daerah dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi. Meningkatnya kegiatan investasi suatu daerah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan kegiatan investasi tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pada akhirnya mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan (Sjafrizal, 2018).

Tabel 1.2
Nilai Investasi Bersumber dari PMA dan PMDN Provinsi Jambi Tahun 2000-2023
(Jutaan Rupiah)

Tahun	PMA (Rp)	PMDN (Rp)	Investasi (Rp)	PMA (%)	PMDN (%)	Investasi (%)
2000	304.347	4.541.318	4.845.666	-	-	-
2001	340.989	5.426.680	5.767.669	12,04	19,50	19,03
2002	422.369	6.312.042	6.734.411	23,87	16,31	16,76
2003	585.728	7.197.403	7.783.132	38,68	14,03	15,57
2004	649.087	8.082.765	8.731.852	10,82	12,30	12,19
2005	730.529	8.468.661	9.199.190	12,55	4,77	5,35
2006	1.170.499	9.144.985	10.315.484	60,23	7,99	12,13
2007	1.171.456	9.193.509	10.364.965	0,08	0,53	0,48
2008	1.981.520	8.838.272	10.819.792	69,15	(3,86)	4,39
2009	1.641.812	8.048.826	9.690.638	(17,14)	(8,93)	(10,44)
2010	2.005.272	9.611.608	11.616.880	22,14	19,42	19,88
2011	464.402	14.433.096	14.897.498	(76,84)	50,16	28,24
2012	7.450.686	19.933.675	27.384.361	1504,36	38,11	83,82
2013	9.155.386	25.170.266	34.325.652	22,88	26,27	25,35
2014	11.525.838	28.418.185	39.944.023	25,89	12,90	16,37
2015	14.889.838	31.996.708	46.886.546	29,19	12,59	17,38
2016	16.901.285	35.881.108	52.782.393	13,51	12,14	12,57
2017	1.026.404	4.260.684	5.287.088	(93,93)	(88,13)	(89,98)
2018	1.374.500	3.128.225	4.502.725	33,91	(26,58)	(14,84)
2019	1.431.145	5.313.824	6.744.969	4,12	69,87	49,80
2020	1.125.630	7.162.332	8.287.962	(21,35)	34,79	22,88
2021	1.311.146	8.772.616	10.083.762	16,48	22,48	21,67
2022	1.368.090	9.675.000	11.043.090	4,34	10,29	9,51
2023	1.451.140	10.236.000	11.687.140	6,07	5,80	5,83
Rata-Rata				73,96	11,42	12,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai investasi di Provinsi Jambi tahun 2000-2023 berfluktuasi PMA rata-rata sebesar 89,06 persen dan PMDN rata-rata sebesar 10,88 persen dan total investasi rata-rata sebesar 12,35 persen, hal ini dapat dilihat dari nilai investasi tertinggi terdapat pada investasi PMA. Perkembangan nilai investasi di Provinsi Jambi yang cenderung meningkat tentunya dipengaruhi berbagai faktor, baik kondisi lokasi, sumber daya alam maupun sumber daya manusia di wilayah tersebut. Investasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan investasi pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, walaupun sumberdaya yang dimiliki cukup strategis dan memiliki jumlah yang melimpah (Jhingan, 2014: 88). Namun persebaran investasi yang tidak merata di Provinsi Jambi ini tentunya akan berdampak pada kesenjangan pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan di Provinsi Jambi.

Kemiskinan menjadi permasalahan dalam ketimpangan pendapatan yang mengandung dua aspek, aspek pertama adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada dibawah garis kemiskinan, sedang aspek kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk atau rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Keberhasilan mengatasi aspek yang pertama dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara keberhasilan memperbaiki distribusi pendapatan secara menyeluruh adalah jika laju pertumbuhan pendapatan golongan miskin lebih besar dari laju pertumbuhan pendapatan golongan kaya (Kuncoro, 2015: 97). Berikut adalah data kemiskinan Provinsi Jambi.

Tabel 1.3
Penduduk Miskin Provinsi Jambi Tahun 2000-2023 (Jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (persen)
2000	2.407.166	328.200	13,63
2001	2.439.873	327.400	13,42
2002	2.484.027	326.900	13,16
2003	2.568.598	327.300	12,74
2004	2.619.553	325.100	12,41
2005	2.635.968	317.800	12,06
2006	2.683.099	304.600	11,35
2007	2.742.196	281.900	10,28
2008	2.788.269	261.200	9,37
2009	2.833.744	245.000	8,65
2010	2.862.265	260.400	9,10
2011	2.927.578	251.800	8,60
2012	2.967.096	268.500	9,05
2013	3.026.070	277.700	9,18
2014	3.114.421	281.750	9,05
2015	3.202.052	300.710	9,39
2016	3.318.926	289.810	8,73
2017	3.415.017	286.550	8,39
2018	3.470.272	281.690	8,12
2019	3.524.579	274.320	7,78
2020	3.577.894	277.800	7,76
2021	3.681.301	293.860	7,98
2022	3.728.501	279.370	7,49
2023	3.792.231	280.680	7,40
Rata-Rata			9,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi berfluktuasi tahun 2000-2023 rata-rata meningkat sebesar 9,80 persen, tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu mencapai 13,63 persen

dan yang terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 7,40 persen. Di Provinsi Jambi menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang semakin menurun tetapi penurunan yang cukup kecil jika dibandingkan setiap tahunnya. Hal ini karena tingginya tingkat ketimpangan di Provinsi Jambi masih menjadi masalah yang harus diatasi.

Pertambahan penduduk cenderung berdampak terhadap penduduk miskin terutama bagi mereka yang tergolong sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan akan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan sehingga salah satu penyebab kemiskinan adalah ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya (Kuncoro, 2015: 99).

Alat ukur untuk melihat distribusi ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat adalah dengan melihat dari indeks gini (gini ratio). Dalam indeks gini yaitu memiliki kisaran 0-1. Ketika indeks gini mendekati 0 berarti menandakan ketimpangan semakin rendah (merata), akan tetapi apabila mendekati angka 1 berarti menandakan jika ketimpangan antar masyarakat tinggi dan semakin melebar (Sjafrizal, 2018: 25).

Ketimpangan dapat terjadi karena perbedaan produktivitas setiap individu di mana satu individu atau kelompok memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan individu atau kelompok lainnya. Empat faktor penyebab ketimpangan yang menjadi perhatian pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah ketimpangan peluang, ketimpangan pasar kerja,

konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Berikut ketimpangan pendapatan Provinsi Jambi:

Tabel 1.4
Indeks Gini Ratio Provinsi Jambi Tahun 2000 – 2023 (Poin)

Tahun	Gini Ratio (Poin)	Perkembangan (%)
2000	0,240	-
2001	0,250	4,17
2002	0,270	8,00
2003	0,260	(3,70)
2004	0,250	(3,85)
2005	0,240	(4,00)
2006	0,330	37,50
2007	0,300	(9,09)
2008	0,300	0,00
2009	0,269	(10,33)
2010	0,304	13,01
2011	0,348	14,47
2012	0,359	3,16
2013	0,327	(8,91)
2014	0,342	4,59
2015	0,344	0,58
2016	0,346	0,58
2017	0,334	(3,47)
2018	0,335	0,30
2019	0,324	(3,28)
2020	0,316	(2,47)
2021	0,315	(0,32)
2022	0,335	6,35
2023	0,343	2,39
Rata-Rata	0,308	1,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tabel 1.4. menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur melalui gini ratio di Provinsi Jambi tahun 2000 – 2023 berfluktuasi rata-rata meningkat 0,308 poin atau naik 1,99 persen, indeks gini ratio tertinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar 0,330 poin atau naik 37,50 persen dan terendah pada tahun 2009 sebesar 0,269 poin turun 10,33 persen. Saat ini, ketimpangan ekonomi Provinsi Jambi cukup memprihatikan. Hal ini dapat dilihat dari rasio gini yang mencapai 0,308 yang menunjukkan kriteria ketimpangan

rendah. Rasio gini adalah suatu angka bernilai 0-1, di mana 0 menunjukkan ketiadaan ketimpangan dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

Dari uraian tersebut ketimpangan pendapatan disebabkan karena terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat pendapatan rill dari yang kaya terus tumbuh lebih cepat sedangkan yang miskin terus berkurang (Todaro, 2014:156). Ketimpangan pendapatan dalam praktik sering menimbulkan kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi di berbagai daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, sumber daya alam yang melimpah seharusnya memberikan kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak kepada masyarakat, permasalahan dalam pembangunan antar daerah diakibatkan adanya sumber daya alam dan kondisi demografis yang berbeda di setiap daerah sehingga proses pembangunan di setiap daerah yang mengakibatkan ketimpangan, oleh karena itu peneliti tertarik mengambil riset yang menarik untuk dikaji, adapun judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Investasi dan Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Pendapatan d Provinsi Jambi Tahun 2000-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Rata-rata perkembangan Dana Alokasi Umum di Provinsi Jambi periode 2000-2023 berfluktuasi cenderung meningkat sebesar 5,86%. Dana alokasi umum yang berfluktuasi akan berdampak pada ketidakmerataan kemampuan keuangan

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi mengatasi ketimpangan yang terjadi.

2. Rata-rata perkembangan Investasi di Provinsi Jambi periode 2000-2023 berfluktuasi cenderung meningkat sebesar 12,35%. Akan tetapi investasi yang berfluktuasi belum berdampak dan mengakibatkan ketidakmerataan persebaran lapangan usaha antardaerah dalam meningkatkan pembangunan wilayah.
3. Rata-rata perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Jambi periode 2005-2023 berfluktuasi cenderung meningkat sebesar 9,80%. Meningkatnya dana alokasi umum dan Investasi belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi Provinsi Jambi
4. Rata-rata perkembangan Ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi tahun 2000-2023 berfluktuasi rata-rata meningkat sebesar 1,99%. Besar atau kecil angka ketimpangan pendapatan akan berdampak buruk atau baiknya pada kesejahteraan masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum, investasi dan penduduk miskin secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi Tahun 2000 – 2023?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum, investasi dan penduduk miskin secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi Tahun 2000 – 2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum, investasi dan penduduk miskin secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi Tahun 2000 – 2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum, investasi dan penduduk miskin secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi Tahun 2000 – 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya bagi para civitas ilmu ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi Praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mempertimbangkan kebijakan untuk menekan angka disparitas pendapatan di Provinsi Jambi.